

Oleh: Asep Purnama Bahtiar

Suatu bangsa, tulis Carlton C. Rodee (1995), pada hakikatnya ingin melestarikan dirinya serta organisasi negaranya. Pelestarian ini memerlukan jaminan, baik yang langsung dapat dimanfaatkannya untuk mendukung pelestarian tersebut, antara lain berupa kebutuhan materiil dan spiritual, maupun yang tidak memberikan jaminan kepastian dan pengayoman, seperti lazimnya dalam hal jaminan yang berupa ketentuan moral maupun hukum.

Pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa keuletan, ketangguhan, dan kemampuan suatu bangsa dalam merespons gangguan dan ancaman itu merupakan kondisi dan sikap yang strategis. Dalam konteks inilah pergulatan ideologi bangsa untuk membangun ketahanan dan daya saing, terutama dalam percaturan global, perlu ditata dan dikelola by design agar produktif dan konsisten. Istilah ideologi pertama kali digunakan oleh filsuf Prancis, Destutt de Tracy, pada 1796 untuk menjelaskan ilmu baru yang ia rancang mengenai analisis sistematis tentang ide dan sensasi, tentang makna turunannya kombinasinya dan akibat yang ditimbulkannya. Menurut Lyman Tower Sargent (1987), ideologi adalah sebuah sistem nilai atau kepercayaan yang diterima sebagai fakta atau kebenaran oleh beberapa kelompok.

Lebih lanjut, Sargent menjelaskan, ideologi dibentuk dari serangkaian sikap terhadap institusi-institusi dan proses-proses dari masyarakat yang bermacam-macam. Ideologi menyediakan sebuah gambaran dunia bagi orang-orang yang mempercayainya, baik yang seadanya maupun yang seharusnya, dan, dalam tindakannya pula, ideologi mengorganisasikan kompleksitas yang hebat dari dunia kepada sesuatu yang sederhana dan bisa dipahami secara agak baik.

Berdasarkan pengertian tersebut, ideologi tidak hanya dimiliki oleh suatu negara atau bangsa, tetapi juga organisasi, perkumpulan, kelompok, dan bahkan individu, sekalipun bisa memiliki atau menganut suatu ideologi. Karena tidak mengenal batasan orang atau organisasi, daya rusak dan sekaligus potensi daya rusak ideologi itu tidak kalah massif dan destruktifnya bagi keutuhan suatu negara dan pandangan hidup bangsa. Sebagai negara-bangsa yang masih berkebutuhan dengan berbagai masalah pembangunan nasional, ketahanan ideologi di Indonesia sangat penting untuk mendapat perhatian.

Ketahanan ideologi yang prima bisa menjadi daya hidup bangsa yang percaya diri dan bangga dengan nilai-nilai keindonesiaan yang tidak kalah bobotnya dengan ideologi dari luar. Dengan kualitas pandangan hidup seperti ini, upaya untuk menariknya ke tataran implementasi, misalnya dalam pembangunan nasional, dengan sendirinya mudah untuk dilakukan.

Dalam konteks seperti itu, penataan ulang dan pembenahan yang tepat di dalam tubuh negara-bangsa ini merupakan agenda yang mendesak untuk segera dikerjakan bersama-sama. Upaya seperti ini akan sangat memungkinkan untuk menghasilkan etos berbangsa dan bernegara dengan spirit ideologi sendiri, Pancasila, sehingga Indonesia mapan dan semesta sebagai sebuah negara modern dengan kepercayaan diri dan kesanggupan yang luar biasa dalam merealisasi pembangunannya nasionalnya.

Ranah kebangsaan

Dalam ranah kebangsaan, ketahanan ideologi tersebut memerlukan semacam tilikan diri ke dalam (self-insight) untuk mengidentifikasi dan memetakan masalah yang selama ini menghambat aktualisasi dan implementasi Pancasila. Di sini diperlukan kejujuran dan kecermatan dalam menilai dan menganalisis masalah: mana yang prinsipil, mana yang strategis; mana yang urgen, dan mana yang tidak. Langkah selanjutnya kemudian merumuskan beberapa agenda strategis dan perencanaan program yang feasible berikut skala prioritasnya, terutama yang berhubungan langsung dengan penguatan ke dalam tubuh masyarakat dan juga negara-bangsa dalam berbagai aspeknya.

Untuk kepentingan ketahanan ideologi ini pula, Pancasila harus dikembalikan sebagai ideologi. Hal ini berarti bahwa Pancasila harus dijadikan rasional. Menjadikan Pancasila sebagai ideologi rasional tidak berarti "mempersoalkan" Pancasila, dalam arti ragu terhadapnya. Sebaliknya, kita taken for granted dan mengefektifkan Pancasila sebagai ideologi rasional dengan mengubah cara pemasyarakatannya. Itu berarti bahwa alam pikiran mitis yang selama ini dipakai dalam memasyarakatkan Pancasila harus diganti dengan alam pikiran sejarah, sebagaimana dulu sudah dianjurkan oleh almarhum Soedjatmoko sejak 1957 dalam Seminar Sejarah Nasional yang pertama (Kuntowijoyo, 1997).

Spirit yang dikandung dalam revitalisasi dan rasionalisasi Pancasila adalah tekad dan gagasan kemajuan untuk memberikan semacam garansi bagi terbangunnya ketahanan ideologi secara terarah dan berkesinambungan. Tekad dan semangat implementatif ketahanan ideologi dalam ranah kebangsaan adalah strategis, karena masih banyaknya agenda dan persoalan pembangunan nasional yang menyangkut sumber daya manusianya: sikap mental, integritas, dan kompetensi.

Berdasarkan pembahasan tadi, ada tiga poin yang bisa dirumuskan sebagai proposal untuk menata ketahanan ideologi. Pertama, pembangunan dan penguatan bangsa mesti berhubungan langsung dengan sumber daya manusianya. Dalam hal ini, pembangunan dan penguatan kapasitas tadi membutuhkan dukungan kepemimpinan yang berkarakter, visioner, pendidikan yang bermutu, partisipasi anggota dan warga yang proaktif, dan manajemen pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Kedua, rasionalisasi ideologi Pancasila perlu memperoleh prioritas dalam ranah kebangsaan kita. Upaya ini karena perubahan sosial dan perkembangan zaman yang terus bergerak dengan berbagai implikasi persoalannya bagi kehidupan manusia, mustahil bisa direspons secara tepat dan strategis jika tidak didukung dengan ketahanan ideologi secara rasional.

Ketiga, reafirmasi ketahanan ideologi sebagai alternatif bagi pembangunan ketahanan nasional. Poin ini sangat penting, mengingat masih adanya kesalahpahaman masyarakat atau sebagian warga negara tentang konsep ideologi dan Pancasila, yang hanya dipahami sebagai kata benda, dan melupakan pengertiannya sebagai kata kerja.

Dalam hal ini pula pemerintah, kalangan swasta, dan masyarakat madani bisa melakukan gerakan kultural kepada warga masyarakat dan bangsa, misalnya dalam bentuk internalisasi-eksternalisasi-obyektivasi nilai-nilai Pancasila dan budaya kewargaan secara simultan. Kultivasi Pancasila secara rasional tadi pada akhirnya nanti bisa menjadi basis

pemekaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang lebih demokratis dan civilized.

Di sinilah ketahanan ideologi dalam ranah kebangsaan menjadi bermakna.

Penulis: Kepala Pusat Studi Muhammadiyah dan Perubahan Sosial Politik UMY; Peserta PPSA XVI/2009 Lemhannas RI

Sumber: Harian Tempo, Rabu 17 Juni 2009